

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pemerintahan	2 Tugas dan 1 Laporan
		2. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Hukum dan Organisasi	1 Tugas
		3. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	: 283 600 000
2.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kerjasama yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	: 237 926 000
3.	Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	: 584 592 000
4.	Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota	: 249 746 000
5.	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah	: 249 246 000
Total Anggaran		: 1 605 110 000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Keuangan	1 Tugas
		2.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya	: 238 146 000
2.	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota	: 255 234 000
Total Anggaran		: 493 380 000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pengawasan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya	503 370 000
Total Anggaran		503 370 000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan PTSP	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	: 500 000 000
Total Anggaran		: 500 000 000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.